

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. DASAR PEMIKIRAN

Nahdlatul Ulama' atau NU adalah wadah para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan berdasarkan kesadaran bermasyarakat pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Sebagai sebuah *jam'iyyah* NU bertujuan memelihara, melestarikan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian martabat manusia.<sup>1</sup> *Hadratussyekh* KH. Hasyim Asy'ari adalah pendiri sekaligus *Rais' Akbar* pertama NU. Meski berlatar belakang *jam'iyyah* sebagai organisasi sosial dan keagamaan, NU justru cukup mesra dengan aktivitas politik. Menurut Wahab Chasbullah, salah seorang tokoh pendiri NU, bagi *jam'iyyah* politik adalah alat untuk melindungi dan menjamin baik kepentingan NU maupun umat Islam pada umumnya.

Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Partai Masyumi berdiri atas dasar prinsip bahwa umat Islam Indonesia seharusnya menyatukan aspirasi politiknya serta melaksanakan perjuangannya melalui partai tunggal.<sup>2</sup> Masyumi, satu-satunya partai politik yang menyalurkan aspirasi politik umat Islam, dibentuk melalui Kongres Umat Islam yang dihelat di Gedung Madrasah Mu'alimin

---

<sup>1</sup> *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama'*.

<sup>2</sup> Nurlira Goncing. *Politik Nadatul Ulama dan Orde Baru*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Volume 1, Number 1, Januari 2015. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2015.

Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945. Organisasi-organisasi Islam, termasuk NU, menjadi anggota istimewa. Selain organisasi, Masyumi juga menerima anggota perorangan.<sup>3</sup>

Keanggotaan NU di Masyumi hanya bertahan selama 7 tahun. Kemudian di tahun 1952 NU keluar dari keanggotaan Masyumi. Setelah berpisah dengan Masyumi, NU mendeklarasikan diri sebagai partai politik. NU segera mempersiapkan keikutsertaannya dalam kontestasi politik pemilu tahun 1955. Dalam debutnya di kontestasi pemilu, NU menduduki posisi ketiga dibawah PNI dan Masyumi. NU memperoleh total 6.955.141 (18,4 %) suara.<sup>4</sup> Pencapaian yang luar biasa bagi sebuah partai politik baru. Apalagi menurut penelusuran Herbert Feith (1999), dibandingkan dengan partai-partai besar lain NU tidak banyak menggunakan surat kabar atau media cetak dalam mengkampanyekan dukungan.<sup>5</sup>

Tetapi disisi lain, hal tersebut bisa dikatakan wajar apabila melihat NU sebagai sebuah *jam'iyah* memiliki basis massa yang besar dari kalangan nahdliyin. Potensi yang sedemikian besar inilah yang kemudian dilihat sebagai kekuatan politik NU. Atas dasar realita potensi kekuatan yang sedemikian besar, inilah yang mendorong Mahbub Djunaidi untuk konsisten memperjuangkan *jam'iyah* NU dalam garis politik.

Mahbub Djunaidi, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1933. Mahbub

<sup>3</sup> Historia.id. *Mengapa NU Keluar dari Masyumi*. 20 Januari 2020. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/mengapa-nu-keluar-dari-masyumi-PzMm8>

<sup>4</sup> Dilihat dari A. van Marle. „*The First Indonesian Parliamentary Elections*“, *Indonesie* (1956).

<sup>5</sup> Herbert Feith. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 1999) hlm 36.

merupakan putra dari pasangan KH. Djunaidi dan Muchsinatin. Darah NU dan berpolitik didapat Mahbub dari sang Ayah, salah seorang tokoh NU yang pernah menjadi anggota DPR/GR hasil pemilu 1955. Djunaidi mengabdikan dirinya untuk NU hingga wafat. Pengabdian sang ayah kemudian diikuti Mahbub yang juga aktif dalam organisasi NU hingga akhir hidupnya. Mahbub merupakan anak pertama dari tiga belas bersaudara.

Mahbub adalah seorang penulis *mashyur*. Karya-karyanya mulai dari catatan jurnalistik, cerpen, puisi, esai, novel, hingga terjemahan kerap menuai pujian banyak kalangan. Menurut penuturan sang anak, Isfandiari MD, sejak duduk di bangku sekolah dasar Mahbub sudah fasih menulis dan rajin membaca. Memiliki gaya khas dan produktif dalam menulis, Mahbub bahkan mendapatkan julukan *Sang Pendekar Pena*.<sup>6</sup> Menurut Goenawam Mohamad, Mahbub mampu menulis hingga membuat orang tertawa meski tulisannya cukup serius. Kelebihan Mahbub dalam setiap kolomnya yang belum tertandingi siapapun, ialah bahwa ia bisa mengatasi mempergunakan bahasa Indonesia dengan kecakapan seorang *mime* yang setingkat Marcel Marceau.<sup>7</sup>

Setelah lulus dari bangku SMP, Mahbub diajak oleh kedua orang tuanya pindah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di SMA Budi Utomo –sekarang SMAN 1 Jakarta-. Semasa bersekolah di SMA Budi Utomo kegemaran Mahbub menulis semakin berkembang. Mahbub mendirikan majalah siswa dan bertindak

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Isfandiari Mahbub Djunaidi di Tangerang, 13 Januari 2021. Isfandiari MD, putra Mahbub Djunaidi, lahir pada tahun 1971. Isfandiari menjadi saksi atas keseharian Mahbub Djunaidi hingga wafat pada tahun 1995.

<sup>7</sup> Mahbub Djunaidi. *Kolom Demi Kolom*. Pengantar: Goenawam Mohamad. (Malang: Literasi Nusantara, 2017). hlm. viii.

sebagai pemimpin redaksi majalah tersebut.

Mahbub tumbuh dan besar di lingkungan suku Betawi, di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Isfandiari MD, lingkungan suku Betawi, cukup mempengaruhi pemikiran Mahbub. Hal yang paling menonjol, tentu perihal pemikiran demokrasi ala Mahbub. Digambarkan oleh Isfandiari MD, lingkungan suku Betawi memiliki prinsip egaliter dan jauh dari kesan feodalistik. Prinsip tersebut yang kemudian mendasari pemikiran demokrasi ala Mahbub dalam berpolitik.

Kemampuan berpolitik Mahbub berkembang dari pengalaman keorganisasian yang pernah ia ikuti. Mahbub bahkan sudah menjadi ketua IPPI saat duduk dibangku SMP pada tahun 1952. Kemudian saat duduk dibangku SMA Mahbub bergabung kedalam IPNU, organisasi bagi para pelajar NU.<sup>8</sup> Menurut Said Budairry, A.A. Murtadho, ketua IPNU Jakarta, adalah sosok yang mengenalkan Mahbub dengan IPNU.<sup>9</sup> Mahbub kemudian menjadi salah satu pengurus fungsionaris IPNU Jakarta.

Selepas menamatkan studi di SMA Budi Utomo, Mahbub melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa kala itu, Mahbub memanfaatkan momen untuk menyebarkan gagasan lewat tulisan-tulisan yang ia buat dan aktif menjadi aktivis di kalangan mahasiswa UI. Mahbub kemudian bergabung dengan HMI. Capaian tertinggi Mahbub dalam organisasi

---

<sup>8</sup> Vivit Evi Puspitasari. *Mahbub Djunaidi (Studi Tentang Peranannya dalam Sejarah Perkembangan Pers Islam di Indonesia Pada tahun 1960-1970)* Skripsi, IAIN Sunan Ampel. hlm 27.

<sup>9</sup> KOMPAS. „Mengenang H. Mahbub Djunaidi, Konsisten, Santai, Kocak“. 25 Oktober 1995.

tersebut adalah menjadi ketua departemen pendidikan PB HMI periode 1957 -1960. Adapun alasan bergabungnya Mahbub dengan HMI adalah karena organisasi tersebut merupakan satu-satunya wadah bagi mahasiswa Islam saat itu. Meski NU sendiri telah memiliki IPNU, namun aktivitas IPNU terbatas di kalangan pelajar.<sup>10</sup>

Kehadiran IPNU yang merupakan entitas kalangan pelajar NU, ternyata tidak cukup untuk mewartakan minat organisasi kalangan mahasiswa NU. Atas dasar keterbatasan tersebut, mahasiswa NU yang sebelumnya bergabung bersama IPNU menyelenggarakan musyawarah untuk membentuk sebuah organisasi yang akan menjadi entitas bagi mahasiswa NU. Musyawarah tersebut diselenggarakan pada tanggal 14-16 April 1960 di Surabaya. Melalui kesepakatan musyawarah tersebut, dibentuklah sebuah organisasi yang bernama PMII. Secara historis, PMII merupakan mata rantai dari departemen perguruan tinggi IPNU.<sup>11</sup>

Para peserta musyawarah tersebut kemudian menunjuk Mahbub Djunaidi, sebagai ketua umum PMII yang pertama. Pemilihan tersebut bisa dikatakan cukup menarik karena Mahbub sendiri tidak hadir dalam musyawarah tersebut. Setelah terpilih sebagai ketua umum PMII, Mahbub kemudian menjalankan tugas nya untuk membesarkan PMII.

Di bawah kepemimpinan Mahbub, PMII berkembang menjadi organisasi mahasiswa yang cukup disegani. Selama memimpin PMII dalam kurun waktu 1960-1967 Mahbub membawa PMII untuk menghasilkan produk-produk

<sup>10</sup> Otong Abdurrahman. *PMII (1960-1985) Untukmu Satu Tanah Airku Untukmu Satu Keyakinanku*. (Jakarta: PB PMII. 2005). hlm 26.

<sup>11</sup> Fauzan Alfas. *PMII Dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*. (Jakarta: PB PMII. 2015). hlm 1.

intelektual seperti yang tertuang dalam Deklarasi Tawangmangu (1960), Kesimpulan Ponorogo (1965), dan Memorandum Jakarta (1966). Dalam kurun waktu 7 tahun, Mahbub berhasil membawa PMII untuk membentuk 75 cabang yang berkedudukan di kabupaten / kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Terpilihnya Mahbub sebagai ketua umum PMII di tahun 1960 bukanlah puncak karirnya sebagai seorang aktivis politik NU. Namun terpilihnya sebagai ketua umum pertama dan keberhasilannya membesarkan PMII menjadi titik awal dari sepak terjangnya sebagai seorang aktivis politik NU. Dan melalui PMII Mahbub aktif menarasikan visi politiknya.

Di tahun 1960 Mahbub juga terpilih sebagai salah satu perwakilan Fraksi Partai NU untuk duduk menjadi anggota DPR/GR. Meski menjadi seorang anggota DPR/GR rupanya tidak melunturkan idealisme Mahbub. Kesempatannya duduk menjadi anggota DPR/GR dimanfaatkan untuk memperjuangkan UU tentang keterbukaan pers. Hal tersebut didasari atas keresahan Mahbub yang merasakan sulitnya bagi jurnalis untuk dapat menyebarluaskan tulisan tanpa harus mendapatkan pengamanan sensor yang ketat. Bahkan tidak jarang beberapa lembaga pers yang mendapatkan perlakuan pembredelan di kurun waktu 1959-1966.

Meski dikenal sebagai seorang jurnalis dan aktivis, Mahbub merupakan pribadi yang supel dan mudah bergaul. Bahkan Mahbub juga cukup dekat dengan Presiden Soekarno. Adalah Syaifudin Zuhri, Menteri Agama RI 1962-1967, yang mengenalkan Mahbub pada Soekarno. Meski dikenal cukup dekat dengan Presiden



Soekarno, Mahbub tidak segan untuk memberikan kritik terhadap pemimpin bangsa tersebut. Mahbub kerap mengkritik Presiden Soekarno dalam berbagai kesempatan.

Mahbub muda menjadi saksi transisi kekuasaan pemerintah orde lama Presiden Soekarno menuju orde baru Presiden Soeharto. Di dalam transisi kekuasaan tersebut kalangan anak muda NU turut berperan menumbangkan rezim orde lama. Salah satunya adalah Zamroni, ketua umum PMII 1967-1970, yang juga menjadi tokoh sentral dalam gerakan KAMI. Zamroni menjadi aktor utama di kalangan mahasiswa dalam gerakan besar-besaran yang juga sebagai salah satu penyebab kejatuhan rezim orde lama. Dalam situasi tersebut, Mahbub memilih untuk tidak terlibat terlalu jauh. Meski kerap melontarkan kritik terhadap Presiden Soekarno, bagaimanapun Mahbub dikenal cukup dekat dengan Presiden Soekarno.

Masa pemerintahan Orde baru dimulai pada tahun 1967 ketika Soeharto diangkat sebagai Presiden. Orde baru yang sebelumnya cukup mesra dengan kalangan mahasiswa kemudian perlahan menunjukkan wajah aslinya. Kehidupan kontra demokrasi menjadi wajah asli orde baru yang pada akhirnya memicu perlawanan dari berbagai kalangan massa termasuk partai politik dan mahasiswa. Kekecewaan publik terhadap pemerintah orde baru sudah mulai dirasakan sejak tahun 1971 atau lima tahun setelah rezim tersebut berkuasa.

Pemilu 1971 menjadi panggung kedigdayaan Golkar dalam kontestasi politik nasional. Sebagai pendatang baru, Golkar berhasil memenangkan pemilu 1971 dengan perolehan 62,8% suara. Menurut Mahbub kemenangan Golkar tidak begitu saja diraih tetapi dikarenakan adanya tindakan curang yang sistemik. Hasil

pemilu 1971 tidak semata-mata tertuju pada hasil perhitungan suara saja, melainkan peristiwa-peristiwa disaat masa kampanye dan segala bentuk kekerasannya.<sup>12</sup> Saat itu Mahbub yang menjabat sebagai wakil sekjend Partai NU mendesak Yusuf Hasyim sebagai sekretaris jenderal NU untuk menolak hasil pemilu 1971. Ia pun juga mendesak perwakilan NU di DPR untuk menolak duduk dikursi parlemen.<sup>13</sup>

Pemilu 1971 adalah kontestasi politik terakhir yang diikuti oleh partai NU. Dan di tahun 1971 pula adalah pemilu satu-satunya sepanjang masa pemerintahan orde baru yang diikuti oleh 8 partai politik. Di tahun 1973 dikeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik oleh pemerintah orde baru. Partai NU, PSII, Perti, dan Parmusi tergabung dalam PPP yang dideklarasikan tanggal 5 Januari 1973. PNI, Partai Murba, IPKI, Parkindo dan Partai Katolik tergabung dalam PDI yang didirikan tanggal 10 Januari 1973. Maka sejak saat itu kontestasi politik di Indonesia hanya diikuti oleh dua partai politik, yaitu PPP dan PDI, dan satu Golkar. Golkar sebagai kendaraan politik Presiden Soeharto tidak dikategorikan sebagai partai politik namun memiliki hak untuk mengikuti pemilu.

Setelah NU bergabung dengan PPP, Mahbub melanjutkan manifestasi politiknya bersama PPP. Mahbub kerap melontarkan kritik dan perlawanannya terhadap pemerintah orde baru. Pada pemilu 1977 Mahbub mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Timor Timur. Hal tersebut cukup menarik karena penduduk Timor Timur mayoritas beragama kristiani atau dengan kata lain bukan konstituen dari PPP. Apalagi praktis hanya Golkar yang memiliki

---

<sup>12</sup> Mahbub Djunaedi. *Politik Tingkat Tinggi Kampus*. (Malang: Literasi Nusantara. 2017). hlm 7-8.

<sup>13</sup> *Ibid.*,



kemampuan dapat mendulang suara pemilih di Timor Timur. Atas dasar realita tersebut, apa yang dilakukan Mahbub diindikasikan sebagai bentuk kritik nya atas penyelenggaraan pemilu di masa pemerintah orde baru. Kritik-kritik Mahbub kian tajam ketika menjelang dan selepas pemilu 1977 digelar.

Puncaknya esai Mahbub berjudul *Demokrasi Babi* seakan menampar pemerintah orde baru. Atas penerbitan esai tersebut, surat kabar Tempo bahkan harus menanggung pembredelan oleh aparat. Tepat ditanggal 11 April 1978 Mahbub ditangkap oleh aparat atas tuduhan subversif. Mahbub digelandang ke penjara Nirbaya sebagai tahanan politik. Sebelum digelandang ke penjara, Mahbub memang dikenal cukup aktif menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah orde baru melalui mimbar-mimbar akademik dari kampus ke kampus. Menurut Hussein Badjerei, Mahbub adalah seorang demokrat dan reformis tulen. Kepada para mahasiswa Mahbub hanya ingin memasyarakatkan demokrasi sejati dengan menyampaikan pendiriannya, bahwa setiap orang asal memenuhi persyaratan bisa saja dicalonkan menjadi presiden.<sup>14</sup>

Sementara itu dikalangan internal, para elit NU mulai gerah dengan situasi di tubuh PPP. Beberapa tokoh penting NU seperti Abdurrahman Wahid, Syaifuddin Zuhri, Jusuf Hasjim, Chalik Ali dan Imron Rosyadi menjelang pemilu 1982 mengancam keluar dan melepaskan diri dari PPP. Ancaman itu tidak hanya menggambarkan kekecewaan NU, tetapi juga seriusnya konflik yang terjadi di

---

<sup>14</sup> Husein Badjerei. Said Budairy (ed.). *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik Dari Kalangan NU Modern*. (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001). hlm 166.

dalam PPP.<sup>15</sup>

Situasi konflik di tubuh PPP semakin keruh dengan kehadiran Jailani Naro, yang kemudian menjadi ketua umum PPP melalui Mukhtar I PPP di Jakarta tahun 1984. Fenomena Jailani Naro adalah wujud dari intervensi pemerintah orde baru kedalam tubuh PPP. Sampai pada akhirnya perpecahan di tubuh PPP tidak bisa dihindari.

Di tahun 1984 NU menyatakan diri keluar dari PPP. Keputusan tersebut disampaikan dalam Mukhtar ke-27 NU di Situbondo. Melalui Mukhtar tersebut NU juga memutuskan untuk kembali ke *khittah* 1926. Dengan demikian NU kembali bergerak dalam koridor keagamaan yang berujuan ikut membangun dan mengembangkan insan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah swt., cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Inilah yang kemudian disebut dengan *khittah* NU.<sup>16</sup> Akibat dari keputusan kembali ke *khittah* tidak hanya membuat NU melepaskan diri dari PPP, tetapi juga memaksa NU untuk menarik diri dari segala aktivitas politik praktis.

Pasca melepaskan diri dari PPP, tokoh-tokoh NU kemudian melakukan pengembosan di internal PPP. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan pemilih PPP dari basis nahdliyin bahwa NU sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai tersebut. Mahbub Djunaedi adalah salah satu tokoh NU yang cukup aktif melakukan safari politik untuk menggembosi internal PPP. Pengembosan tersebut berakibat

<sup>15</sup> Syamsuddin Haris. PPP Dan Politik Orde Baru. ( Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana, 1991) hlm 54.

<sup>16</sup> KH. Hasyim Asy'ari, dkk. *Khittah dan Khidmah*. M. Bisri Adib Hattani (ed.). (Pati: Majma Buhuts An-Nahdliyah. 2014). hlm 41 – 43.

pada anjlok nya suara yang diperoleh PPP pada pemilu di tahun 1987. Pemilu 1987 adalah pemilu pertama ketika perpecahan partai tidak dapat dihindari lagi.<sup>17</sup>

Sebagai seorang yang memiliki visi dan keberpihakan politik, prinsip Mahbub diuji ketika NU memutuskan untuk kembali ke *khittah*. Meski terlibat dalam pengembosan yang dilakukan oleh elit NU terhadap internal PPP, namun Mahbub tidak benar-benar menginginkan NU untuk meninggalkan aktivitas politik praktis. Mahbub tetap menginginkan bahwa elit NU yang sudah masuk ke dalam internal PPP untuk melanjutkan perjuangan politiknya. Bahwa *khittah* NU tidak melarang perorangan dari kalangan NU untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Mahbub kemudian menginisiasi konsep *khittah plus* NU. Melalui *khittah plus*, Mahbub menginginkan untuk tidak mencampuri antara urusan politik dan urusan *jam'iyah* NU. Dalam hal ini, Mahbub menginginkan siapapun elit NU yang terjun dalam aktivitas politik praktis untuk menanggalkan jabatan sebagai salah satu pengurus di struktural NU. Tentang prinsip dalam berpolitik, bagaimanapun bagi Mahbub politik adalah aktualisasi dari cita-cita mewujudkan kesejahteraan umat. Konsep *khittah plus* kemudian menjadi pembahasan utama dalam Konbes NU di Cilacap tahun 1987.

Ialah Mahbub Djunaidi, aktivis dan seniman politik NU. Ia adalah seorang seniman, yang memiliki dimensi bebas nilai. Ia mampu menjadi seorang jurnalis, penulis, kolumnis, penerjemah, kritikus, organisatoris, politisi, dan pemimpin yang

---

<sup>17</sup> Syamsuddin Haris. *PPP dan Politik Orde Baru*. Op.Cit, hlm 2.

disegani. Layaknya seorang seniman, ia tidak pernah berhenti menghibur setidaknya lewat kolom demi kolom yang kerap dimuat. Dan layaknya seorang aktivis, ia adalah sosok yang tidak pernah berhenti berjuang. Ialah Mahbub Djunaidi, sang aktivis politik Nahdlatul Ulama’.

Berdasarkan pemaparan tersebut, topik ini menjadi penting untuk dibahas karena pemikiran politik Mahbub masih sangat relevan dengan situasi hari ini. Mahbub yang merupakan seorang aktivis, tumbuh dan berkembang menjadi seorang politisi yang berpegang pada idealisme nya. Bagi Mahbub, politik adalah alat untuk memperjuangkan kesejahteraan ummat. Politik adalah alat untuk merawat demokrasi. Melalui tulisan-tulisannya, Mahbub menyampaikan gagasan dan kritiknya terhadap pemerintah. Pemikiran politik Mahbub sangatlah penting untuk direfleksikan oleh kalangan muda hari ini. Seperti apa yang dikenang oleh Ridwan Saidi, pesan sederhana Mahbub lewat tulisan-tulisannya yang menyentuh dan *satire* adalah menjadi orang yang benar dan menjadi pemimpin yang benar.<sup>18</sup>

Dalam membaca kerangka pemikiran politik seorang Mahbub Djunaidi, penulis merujuk pada penuturan Chalid Mawardi. Menurut Chalid Mawardi, Mahbub mulai menunjukkan visi nya terhadap politik ketika berproses di IPNU dan semakin matang ketika menjabat ketua umum PMII. Setidaknya ada tiga visi besar seorang Mahbub Djunaidi dalam berpolitik.

*Pertama*, adalah visi tentang sosialisme. Mahbub bisa dikatakan sebagai seorang revolusioner, karena ia percaya pada *macht forming* dan *macht anwending*

---

<sup>18</sup> Isfandari MD dan Iwan Rasta. *Bung, Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017). hlm. 37.

untuk mewujudkan cita-cita revolusi. Lebih lanjut, visi sosialisme Mahbub dengan jelas tergambar dalam dokumen Deklarasi Tawangmangu (1961), yang dirumuskan langsung oleh Mahbub.

*Kedua* adalah visi tentang nasionalisme. Kritik nya terhadap isu nasional sangat proporsional. Selain itu Mahbub juga kerap memilih berbahasa Indonesia dalam berbagai forum internasional yang pernah ia ikuti. Dengan kata lain Mahbub adalah seorang nasionalis tetapi bukan *chauvinist*.

Dan *ketiga* adalah visi tentang keberagamaan. Sebagai seseorang yang terlahir dan besar dengan kultur nahdliyin, Mahbub justru pernah kedapatan mengkritik kultur keberagamaan warga NU itu sendiri. Semisal bagaimana sikap berlebihan dalam menghormati kiai dan ulama.<sup>19</sup> Ketiga visi tersebut menjadi landasan penulis dalam menguraikan pemikiran politik seorang Mahbub Djunaidi.

Kemudian terdapat penelitian lain yang relevan dengan skripsi ini salah satunya adalah skripsi karya Edi Eka Setiawan yang berjudul *Mahbub Djunaidi: Studi Tentang Pemikiran Khittah Plus NU Tahun 1987* yang diterbitkan oleh Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi karya Edi Eka Setiawan, menjawab permasalahan bagaimana pemikiran Mahbub Djunaidi tentang *khittah plus* NU tahun 1987.

Perbedaan skripsi karya Edi Eka Setiawan dengan penelitian ini terletak dari batasan temporal dan batasan spasial yang lebih fokus meneliti pada tahun 1960

---

<sup>19</sup> Chalid Mawardi. *Mahbub Djunaidi Seniman Politik Dari Kalangan NU Modern*. Said Budairy (ed.) (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu. 2001). hlm 153-155.

hingga 1987. Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan fokus tentang biografi dan peristiwa politik Mahbub Djunaidi. Penelitian ini menggunakan model deskriptif naratif.

## **B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH**

### **1. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini diperlukan adanya pembatasan spasial dan temporal untuk menjawab rumusan permasalahan. Pembatasan masalah itu sendiri diperlukan agar penelitian dapat lebih mendalam, fokus, dan tidak melebar pada permasalahan yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan konteks. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, pokok permasalahan yang diangkat adalah pemikiran politik Mahbub Djunaidi dalam kurun waktu 1960-1987.

Tahun 1960 dipilih karena pada tahun tersebut Mahbub terpilih sebagai ketua umum PMII dan anggota DPR/GR dari perwakilan Fraksi Partai NU. Tahun 1960 adalah titik awal riwayat politik Mahbub Djunaidi. Kemudian tahun 1987 dipilih karena pada tahun tersebut merupakan titik puncak riwayat politik Mahbub Djunaidi yaitu dengan buah pemikirannya terhadap konsep *khittah plus*.

Sementara batasan spasial yang dipilih adalah Indonesia dengan memusatkan perhatian di Jakarta. Hal tersebut dikarenakan aktifitas politik Mahbub Djunaidi dalam kurun waktu 1960-1987 banyak berkutat di Jakarta.



## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, pokok permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan, yaitu:

- 1). Bagaimana perjalanan karir politik Mahbub Djunaidi 1960-1971 ?
- 2). Bagaimana peristiwa politik yang dilalui Mahbub Djunaidi 1973-1987?

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini berjudul *Mahbub Djunaidi; Aktivis Politik Nahdlatul Ulama' (1960-1987)*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan riwayat karir dan peristiwa politik yang dialami seorang Mahbub Djunaidi. Kegunaan penelitian ini secara teoritik diharapkan mampu menjadi acuan referensi dalam sejarah pemikiran politik Mahbub Djunaidi. Sedangkan kegunaan secara praktis adalah sebagai refleksi historis bagi para anggota PMII secara khusus dan warga nahdliyin secara umum dalam meneladani pemikiran serta perjuangan Mahbub Djunaidi.

## D. METODE DAN BAHAN SUMBER

### 1. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara prosedural untuk berbuat dan mengerjakan sesuatu dalam sebuah sistem yang teratur dan terencana. Tentu terdapat sebuah prasyarat dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu prosedur yang sistematis.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan memakai metode penelitian historis. Metode historis menurut Gottschalk adalah suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan.<sup>20</sup> Di dalam penelitian ini akan memakai metode sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang mengungkapkan kejadian dalam ruang dan waktu.

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu heuristik. Heuristik dapat diartikan sebagai pengumpulan sumber. Sumber sejarah dibedakan atas sumber primer dan sekunder. Sumber sejarah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber tulisan dan lisan. Sumber tulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen dan arsip keorganisasian yang pernah diikuti oleh Mahbub, buku-buku dan artikel baik yang ditulis langsung oleh Mahbub atau yang menceritakan tentang dirinya, dan bentuk sumber tulisan lain yang relevan. Data-data tersebut dapat ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan PBNU, Perpustakaan UNJ, dan perpustakaan pribadi milik keluarga Mahbub. Sementara untuk mendapatkan sumber lisan di dalam penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan Isfandari MD (putra Mahbub) dan Chatibul Umam (pendiri Cabang PMII Ciputat) sebagai sumber primer.

Di tahap selanjutnya adalah kritik atau *verifikasi*. Kritik merupakan tahap

---

<sup>20</sup> Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: UI Press. 2008). hlm 18.

untuk menguji kelayakan sumber. Kritik penting untuk dilakukan dalam penelitian sejarah agar sumber dapat terjamin otentitas dan kredibilitasnya. Di dalam penelitian ini kritik dilakukan melalui dua cara yaitu kritik intern dan ekstern. Keabsahan dalam sumber penelitian ini diuji melalui kritik ekstern dengan dilakukannya pengujian dalam bentuk lahiriah sumber. Kemudian, penulis melakukan kritik intern guna mendapatkan kredibilitas sumber. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan isi sumber tersebut dengan sumber-sumber lain.

Kritik esktern dan intern juga diuji pada sumber lisan. Melalui kritik ekstern terhadap narasumber dilakukan dengan mengetahui daftar riwayat hidup narasumber. Sedangkan kritik intern dilakukan dengan uji silang antara pernyataan narasumber dengan isi dari sumber tertulis.

Tahap yang ketiga yaitu, interpretasi atau penafsiran sejarah. Penulis menguraikan dan mensintesisakan sejumlah fakta menjadi sumber sejarah yang akurat. Dalam tahap ini penulis akan menafsirkan tulisan-tulisan Mahbub mengenai politik dan demokrasi sebagai rujukan utama dalam membaca pemikiran politik Mahbub. Dan yang terakhir adalah historiografi, dimana peneliti melakukan penulisan sejarah. Penulis melakukan pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah. Sehingga penelitian yang telah dikaji dapat menjadi sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Bahan Sumber**

Bahan-bahan sumber yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah antara lain seperti buku *Mengerti Sejarah* oleh Louis Gottschalk. *PMII*

*(1960-1985) Untukmu Satu Tanah Airku Untukmu Satu Keyakinanku* oleh Otong Abdurrahman. *PMII Dalam Simpul-Simpul Perjuangan* oleh Fauzan Alfas. *Kolom Demi Kolom* oleh Mahbub Djunaidi. *Politik Tingkat Tinggi Kampus* oleh Mahbub Djunaidi. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* oleh Herber Feith. *PPP dan Politik Orde Baru* oleh Syamsuddin Haris. *Khittah dan Khidmah* oleh M. Bisri Hattani. *PPP, NU. Dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam* oleh Abu Jihan. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* oleh M. Dien Madjid. Dan buku *Bung, Memoar tentang Mahbub Djunaidi* oleh Isfandari MD, yang merupakan anak dari Mahbub Djunaidi.

